

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)  
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI EKS  
KARESIDENAN PEKALONGAN TAHUN 2019 – 2023  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Ekonomi Islam



**Oleh:**

**MAULIDA HIKMIYATI**

**NIM 1705026078**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, Semarang, Kode Pos 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n Maulida Hikmiyati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Maulida Hikmiyati

NIM : 1705026078

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019-2023 dalam Perspektif Ekonomi Islam

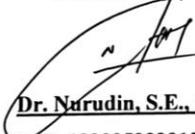
Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, 30 Mei 2023

Pembimbing II

Pembimbing I

  
**Dr. Nurudin, S.E., M.M.**

NIP. 199005232015031 004



**Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E., M.M.**

NIP. 197302172006041001

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Maulida Hikmiyati  
NIM : 1705026078  
Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019-2023 dalam Perspektif Ekonomi Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan Lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal: **26 Juni 2024**  
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2023/2024.

Semarang, 08 Juli 2024

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Heny Yuningrum, S.E., M.Si.**

NIP. 198106092007102005

**Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E., MM.**

NIP. 197302172006041001

Penguji I

Penguji II

**Fajar Adhitva, S.Pd., MM.**

NIP. 198910092015031003



**Mardhiyaturrosfaningsih, M.E.**

NIP. 199303112019032020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Nurudin, S.E., M.M.**

NIP. 199005232015031004

**Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E., MM.**

NIP. 197302172006041001

## **MOTTO**

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka Apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah:6-8)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan atas dukungan orang-orang tersayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Alm. Bapak Shocheh Makmuri. Beliau memang tidak sempat menemani penulis selama ini terutama dalam menempuh pendidikan. Alhamdulillah, kini penulis sudah berada di tahap menyelesaikan karya sederhana ini. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan bapak di tempat yang mulia di sisi Allah SWT.
2. Ibunda tercinta, mama Aeniatun. Beliau sangat berperan penting dalam kehidupan penulis, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi, selalu memberi semangat, mengajari untuk bersabar di setiap proses, dan tiada hentinya selalu mendo'akan yang terbaik untuk anak-anaknya. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mengantarkan penulis hingga ke tahap ini.
3. Kakak-kakak penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta selalu membantu penulis dalam hal apapun.
4. Diri penulis sendiri. Terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk bangkit dan menyelesaikan semua ini.
5. Semua pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain maupun diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2024

Deklarator



Maulida Hikmiyati  
NIM. 1705026078

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

- كُتِبَ - kataba
- ذُكِرَ - žukira
- يَذْهَبُ - yazhabu
- سُنِيَ - suila

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ ...	Fathah dan ya	ai	a dan i

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### a. Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

- raudatu al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

#### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

#### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuzūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

	- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجراها و مرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā <b>Muhammadun</b> illā rasūl.
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	- Inna awwala baitin wudī'a lin-nāsi lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.
شهر رمضان الذي انزل فيه القران	- Syahru <b>Ramadāna</b> al-laḏī unzila fīhi al- <b>Qurānu</b> .
ولقد راه بالفق المبين	- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.
الحمد لله رب العلمين	- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dapat menimbulkan efek domino apabila tidak segera diatasi dengan baik. Pada tahun 2023, dua dari tujuh daerah Eks Karesidenan Pekalongan masuk dalam kategori lima kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder *time series* rentang waktu 2019-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi penelitian ini terdiri dari 7 Kabupaten/Kota yang terletak di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data yaitu uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda serta uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial (t), uji simultan (F) serta uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan menggunakan IBM SPSS 25. Hasil penelitian ini adalah IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2023, dan PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2023. Kemudian secara simultan IPM dan PDRB berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2023.

Kata Kunci : Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto

## **ABSTRACT**

Poverty is a multidimensional problem that can cause a domino effect if not immediately addressed properly. In 2023, two of the seven former Pekalongan Residency areas are included in the category of five districts/cities with the highest percentage of poverty in Central Java. This study aims to determine the effect of the Human Development Index (HDI) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the poverty rate in the former Pekalongan Residency in 2019-2023. This research is a type of quantitative research using secondary time series data for the 2019-2023 time frame obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The Population of this study consisted of 7 regencies/cities located in the former Pekalongan Residency Area with sampling techniques using purposive sampling. The methods used in data analysis are classical assumption tests, multiple linear regression tests and hypothesis tests consisting of partial tests (t), simultaneous tests (F) and coefficient of determination tests ( $R^2$ ) using IBM SPSS 25. The result of this study is that HDI has a negative and significant influence on the poverty rate in the Former Pekalongan Residency in 2019-2023, and GRDP does not have a significant influence on the poverty rate in the Former Pekalongan Residency in 2019-2023. Then simultaneously HDI and GRDP affect the poverty rate in the former Pekalongan Residency in 2019-2023.

**Keywords:** Poverty, Human Development Index, Gross Regional Domestic Product

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi skripsi yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019-2023 dalam Perspektif Ekonomi Islam” sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana strata satu program studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi seluruh alam, keluarga, dan semua umatnya. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti.

Pada penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik maupun saran. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Dr. Nurudin, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam kegiatan penyusunan skripsi.
4. Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam kegiatan penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput kesalahan atau kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun diksi penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

sifatnya membangun untuk kebaikan kedepannya. Kendati jauh dari kesempurnaan, penulis berharap semoga skripsi ini membawa nilai manfaat bagi pembaca.

Semarang, 31 Mei 2024

Penulis

Maulida Hikmiyati  
NIM 1705026078

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Kemiskinan.....	12
2.1.1 Teori Kemiskinan .....	12
2.1.2 Pengertian Kemiskinan .....	13
2.1.3 Macam-Macam Kemiskinan.....	14
2.1.4 Faktor Penyebab Kemiskinan .....	15
2.1.5 Indikator Kemiskinan .....	18
2.1.6 Kemiskinan Perspektif Islam .....	19
2.2 Indeks Pembangunan Manusia .....	20
2.2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia .....	21
2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia Perspektif Islam .....	23

2.3 Produk Domestik Regional Bruto .....	24
2.3.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto.....	25
2.3.2 PDRB Menurut Perspektif Islam .....	27
2.4 Penelitian Terdahulu.....	28
2.5 Kerangka Pemikiran .....	30
2.6 Hipotesis .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.1.1 Jenis Penelitian .....	34
3.1.2 Sumber Data .....	34
3.2 Populasi dan Sampel.....	35
3.2.1 Populasi.....	35
3.2.2 Sampel .....	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.4 Variabel Penelitian .....	36
3.5 Metode Analisis Data .....	37
3.5.1 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda .....	39
3.5.3 Uji Hipotesis .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
4.1.1 Profil Eks Karesidenan Pekalongan.....	42
4.2 Gambaran Umum Variabel.....	47
4.2.1 Kemiskinan .....	47
4.2.2 Indeks Pembangunan Manusia .....	49
4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto.....	50
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	51
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	58
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2023.....	3
Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin Eks Karesidenan Pekalongan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023 (%) .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1 Populasi Penelitian.....	35
Tabel 4.1Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Pekalongan periode 2019-2023 .....	48
Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Pekalongan 2019-2023 .....	49
Tabel 4.3 Perkembangan PDRB Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Eks Karesidenan Pekalongan.....	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas .....	52
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas .....	53
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi .....	55
Tabel 4.8 Hasil Uji T.....	56
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	58
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2023 .....	4
Gambar 4. 1 Peta wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah salah satu fenomena sosial yang kerap dijumpai di berbagai negara. Permasalahan kemiskinan dapat menimbulkan efek domino apabila tidak segera diatasi dengan baik. Suatu negara akan mengalami keterbelakangan apabila tidak ada kesungguhan dalam mengatasi persoalan kemiskinan.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensi yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Fenomena sosial yang bersifat multidimensi tersebut tentu dijadikan sebagai fokus utama pemerintah agar kemiskinan dapat segera teratasi. Selain menjadi fokus pemerintah negara, kemiskinan juga mendapat atensi dalam ajaran agama. Dalam agama Islam, kemiskinan mendapatkan perhatian yang besar.<sup>3</sup> Kemiskinan dianggap sebagai situasi yang berpotensi merusak iman seseorang, dan mengganggu kestabilan keluarga serta masyarakat, dan mendekati kepada kekufuran.<sup>4</sup> Apabila seseorang hidup dalam kemiskinan, dikhawatirkan orang tersebut tidak mampu menunaikan ibadahnya secara maksimal, tidak mampu mengenyam pendidikan, dan tidak memperoleh akses kesehatan yang layak.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara yang masih tergolong berkembang dengan penduduk terbanyak di dunia urutan nomor empat pun tidak luput dari persoalan kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023, populasi Indonesia tembus hingga

---

<sup>1</sup> Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam", *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1, 2017, h.82

<sup>2</sup> Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-qur'an, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*", Vol.5 No.1, 2015, h.73

<sup>3</sup> Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39, No. 1, 2019, h.33

<sup>4</sup> A. Jajang W. Mahri, et.al., *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021, h.386

<sup>5</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.2, 2018, h.218-219

angka 278,69 juta orang.<sup>6</sup> Banyaknya jumlah penduduk tersebut sejalan dengan masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, BPS Indonesia mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam kondisi kemiskinan mencapai 25,90 juta jiwa.<sup>7</sup> Berdasarkan data statistik tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak penduduk yang masih berada di bawah ambang batas kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik didasarkan pada penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita setiap bulan di bawah nilai tertentu yang disebut garis kemiskinan. Ambang batas garis kemiskinan adalah total pengeluaran minimal agar terhindar dari kategori miskin. Pada tahun 2023, nilai ambang batas kemiskinan Indonesia adalah sebesar Rp 550.458,00 per kapita per bulan. Sehingga apabila pengeluaran seseorang kurang dari Rp 18.348,00 per hari, maka orang tersebut dikategorikan miskin atau hidup di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penduduk Indonesia dengan pendapatan di bawah Rp 550.458,00 per kapita masuk kategori tidak mampu.

Orang yang hidup di bawah ambang garis kemiskinan berarti penghasilan yang diperoleh belum mampu mencukupi kehidupan sehari-harinya seperti kebutuhan makanan yang sesuai standar gizi, pendidikan yang layak, pemenuhan akses kesehatan yang memadai, serta kebutuhan atas tempat tinggal yang layak huni. Dibutuhkan kerja sama antar berbagai pihak dan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan kemiskinan.

Hingga saat ini pemerintah telah berupaya untuk meminimalisir kemiskinan yakni dengan menerbitkan regulasi serta kebijakan-kebijakan sosial mendukung pengentasan kemiskinan. Kendati berbagai cara telah diupayakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan, hingga saat ini belum menampakkan hasil yang optimal. Upaya-upaya

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024, h.120

<sup>7</sup> Ibid, h.300

tersebut belum mampu menekan angka kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang kompleks menjadi salah satu fokus utama yang membutuhkan evaluasi berkala. Hal ini diperlukan supaya persentase kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan dapat berkurang.

Dari sekian banyak penduduk miskin yang ada di Indonesia, lebih dari separuhnya tinggal di Pulau Jawa, yang menunjukkan bahwa persentase kemiskinan terkonsentrasi di wilayah tersebut. Padahal selama ini diketahui bahwa Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Indonesia yang mana selama ini pembangunan di Pulau Jawa relatif lebih cepat dibandingkan dengan pulau-pulau di Indonesia yang lainnya. Namun ternyata dibalik pembangunan yang cepat tersebut, kemiskinannya jauh melampaui tingkat kemiskinan di pulau-pulau lainnya.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2023**

Pulau	Jumlah (Juta Orang)
Jawa	13,62
Bali - Nusa Tenggara	2,09
Sumatera	5,67
Kalimantan	0,97
Sulawesi	2,04
Maluku - Papua	1,51

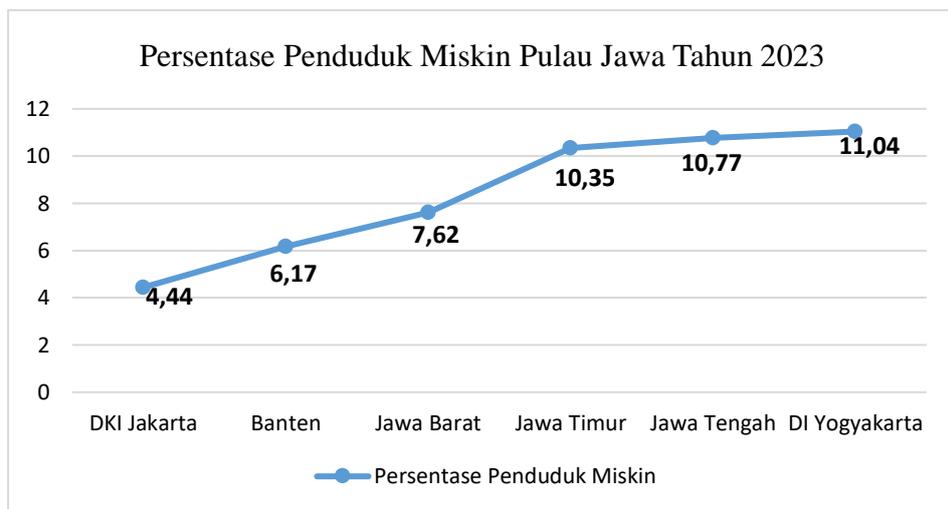
Sumber: BPS 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 total keseluruhan penduduk miskin yang tinggal di Pulau Jawa mencapai 13,62 juta orang, jauh lebih banyak dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Persentase penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 52,60% dari total jumlah penduduk miskin di seluruh Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk miskin terpusat di Pulau Jawa.

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dikategorikan sebagai dua provinsi teratas di Pulau Jawa dengan persentase kemiskinan tertinggi per September 2023. Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat kedua dengan persentase sebesar 10,77 persen.<sup>8</sup> Jawa Tengah diklasifikasikan sebagai *Hard Core Poverty* (>10%), yang menandakan bahwa tingkat kemiskinannya tergolong tinggi.

**Gambar 1. 1**

**Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2023**



Sumber : BPS 2023, diolah

Berdasarkan data statistik BPS, dari total 35 kabupaten/kota yang terdapat di Jawa Tengah, hampir 50 persen dari total kabupaten/kota tersebut masih memiliki tingkat kemiskinan > 10%. Ada 17 Kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami kemiskinan dengan persentase yang tinggi.

Eks karesidenan Pekalongan termasuk salah satu dari enam wilayah eks karesidenan di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini terdiri dari lima kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan. Pada tahun 2023, dua dari tujuh daerah tersebut masuk dalam kategori lima kabupaten/kota

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024, h.301

dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes dan Pemalang.

**Tabel 1.2**

**Persentase Penduduk Miskin Eks Karesidenan Pekalongan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023 (%)**

No.	Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Brebes	16,22	17,03	17,43	16,05	15,78
2	Pemalang	15,41	16,02	16,56	15,06	15,03
3	Pekalongan	9,71	10,19	10,57	9,67	9,67
4	Batang	8,35	9,13	9,68	8,98	8,92
5	Tegal	7,64	8,14	8,6	7,9	7,30
6	Kota Tegal	7,47	7,8	8,12	7,91	7,68
7	Kota Pekalongan	6,6	7,17	7,59	7	6,81

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada tabel 1.2 terdapat fluktuasi angka kemiskinan di seluruh wilayah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Kabupaten Brebes yang mencapai angka 16,22%, sementara persentase terendah terjadi di Kota Pekalongan dengan angka 6,6%. Pada tahun 2020, Kabupaten Brebes masih memimpin tingkat kemiskinan dengan persentase 17,03%, sedangkan Kota Pekalongan tetap dengan daerah dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu 7,17%. Hal yang sama terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dimana Kabupaten Brebes tetap menduduki peringkat pertama persentase kemiskinan tertinggi di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan yaitu sebesar 17,43% pada tahun 2021, kemudian 16,05% pada tahun 2022, dan 15,78% di tahun 2023. Kota Pekalongan tetap mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan persentase kemiskinan terendah.

Meskipun secara data terdapat tren penurunan angka kemiskinan, namun kemiskinan di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Pekalongan masih tergolong tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan Kabupaten/Kota di wilayah tersebut yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Problematika kemiskinan khususnya dalam wilayah Eks Karesidenan Pekalongan berkaitan dengan berbagai faktor. Seperti yang dijelaskan oleh Nurkse dalam teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) tahun 1953, akar dari persoalan kemiskinan bermula dari keterbelakangan serta ketertinggalan SDM yang terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, pasar yang tidak sempurna, serta modal yang kurang, yang mengakibatkan produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah mengakibatkan pendapatan juga rendah yang terlihat pada nilai produk Domestik Regional Bruto yang rendah. Rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya tabungan serta investasi. Rendahnya investasi nantinya akan menyebabkan akumulasi modal juga rendah, dan pada gilirannya menghambat proses penciptaan lapangan kerja. Keterbelakangan tersebut menyebabkan rendahnya akumulasi modal, dan begitu seterusnya.

Sumber daya manusia yang kurang berkualitas bisa menjadi faktor utama dalam menyebabkan kemiskinan, yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indikator untuk menilai perkembangan wilayah, dan cenderung memiliki korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, wilayah yang memiliki IPM tinggi diharapkan penduduknya memiliki standar yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, semakin tinggi IPM, maka semakin rendah kemungkinan adanya tingkat kemiskinan yang tinggi.<sup>9</sup>

Indeks Pembangunan Manusia berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sumber daya manusia.<sup>10</sup> IPM terdiri dari tiga komponen utama yaitu harapan hidup yang sehat untuk menilai aspek kesehatan, rata-rata tahun sekolah untuk mengukur tingkat pengetahuan, dan pengeluaran per

---

<sup>9</sup> Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari, "Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten", *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol.6 No.2, 2016, h.238

<sup>10</sup> Andykha Ridho, et al., "Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah", *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol.33 No.2, 2018, h.115

kapita sebagai penanda daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mencerminkan tingkat kehidupan yang layak.<sup>11</sup>

Indeks Pembangunan Manusia yang rendah dapat mengakibatkan produktivitas kerja penduduk menjadi rendah. Rendahnya produktivitas kerja tersebut kemudian berdampak pada pendapatan yang kurang, dan pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia bisa dianggap sebagai faktor yang berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan.<sup>12</sup>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana yang meneliti pengaruh IPM terhadap kemiskinan memperoleh temuan bahwa IPM mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut hasil penelitian Ridho Andykha, dkk IPM mempunyai pengaruh negatif serta signifikan.<sup>14</sup> Sebagaimana penjelasan sebelumnya, hasil dari penelitian terdahulu tentang hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan masih bervariasi. Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk meneliti apa pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan dalam wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.

Faktor lain yang bisa berpengaruh pada tingkat kemiskinan pada suatu wilayah yakni pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebuah daerah mencakup peningkatan output yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi, yang mencerminkan perkembangan atau kemunduran di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan seberapa jauh

---

<sup>11</sup> Jahtu Widya Ningrum, et al., "Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6, No.2, 2020, h.213

<sup>12</sup> Wawan Kurnia, "Pengaruh Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Dengan Kewilayahan Sebagai Variabel Moderasi)", *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, Vol1 No.1, 2017, h.23

<sup>13</sup> Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan", *Forum Ekonomi*, Vol. 24, No. 1, 2022, h.50

<sup>14</sup> Ridho Andhykha et.al, "Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah", *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol.33 No.2, 2018, h. 120

kegiatan ekonomi akan menghasilkan penambahan pendapatan masyarakat dalam periode waktu tertentu.<sup>15</sup>

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga sebagai kunci dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan dalam mengurangi angka kemiskinan dengan menyejahterakan masyarakatnya.<sup>16</sup>

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mewakili nilai total barang serta jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi dalam wilayah tertentu serta jangka waktu tertentu.<sup>17</sup>

Menurut Thamrin (2001) sebagaimana yang dikutip oleh M. Alhudori, semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah, semakin besar juga potensi pendapatan daerah tersebut dikarenakan pendapatan masyarakatnya juga meningkat.<sup>18</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa apabila nilai PDRB suatu wilayah itu tinggi, maka penduduk wilayah tersebut juga semakin sejahtera. Sehingga dengan makin sejahteranya penduduk, angka kemiskinan di wilayah tersebut juga akan berkurang. Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa PDRB memiliki korelasi negatif terhadap kemiskinan, yaitu jika PDRB meningkat, maka kemiskinan akan menurun. Meskipun demikian, berbagai penelitian yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan yang bervariasi mengenai pengaruh PDRB dengan tingkat kemiskinan.

---

<sup>15</sup> Yozi Aulia Rahman dan Ayunda Lintang Chamelia, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012", *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, Vol.8, No.1, 2015, h.89

<sup>16</sup> Subianto, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas", *Motivasi*, Vol.3 No.2, 2018, h.481

<sup>17</sup> Rio Laksamana, "Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Kalimantan", *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tanjungpura*, Vol.5 No.2, 2016, h.116

<sup>18</sup> M. Alhudori, "Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap penduduk Miskin di Provinsi Jambi", *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business*, Vol. 1 No.1, 2017, h.115

Penelitian terdahulu yang dilakukan Aria Bhaswara Mohammad Bintang dan Nenek Woyanti yang meneliti pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2011 hingga 2015, menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan.<sup>19</sup> Namun hasil penelitian Rapika Kesatriani Damanik dan Selna Aprilia Sidauruk yang juga meneliti pengaruh PDRB terhadap kemiskinan menyimpulkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif serta signifikan.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa masih ada perbedaan antara teori dengan hasil penelitian yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan khususnya di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, dengan judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019-2023 dalam Perspektif Ekonomi Islam.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan?
2. Apa pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan?

---

<sup>19</sup> Aria Bhaswara Mohammad Bintang dan Nenek Woyanti, *Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*, Media Ekonomi dan Manajemen, Vol. 33 No. 1, 2018, h. 25

<sup>20</sup> Rapika Kesatriani Damanik dan Selna Aprilia Sidauruk, *Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Darma Agung, Vol.28 No.3, 2020, h.367

3. Apa pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, adanya penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wawasan berkenaan dengan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat umum atau instansi-instansi terkait sebagai tambahan informasi yang berguna maupun untuk pengambilan keputusan untuk membantu menangani permasalahan kemiskinan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah sekaligus bahan acuan dalam mengembangkan penelitian masa yang akan datang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, memaparkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penjelasan singkat mengenai sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, menguraikan deskripsi teori mengenai kemiskinan, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, review singkat penelitian terdahulu, kerangka teori serta hipotesis penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, yang menjelaskan jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan, yang terdiri dari penjelasan tentang profil dan gambaran umum wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, data hasil penelitian, tahapan analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan serta saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kemiskinan**

##### **2.1.1 Teori Kemiskinan**

Pada umumnya ada dua teori besar (*grand theory*) tentang kemiskinan yang mempengaruhi pemahaman tentang kemiskinan serta cara mengatasinya, yaitu paradigma neoliberal dan demokrasi sosial.<sup>21</sup> Berikut merupakan penjelasan mengenai kedua paradigma atau teori kemiskinan tersebut.

##### 1) Paradigma Neo Liberal

Menurut Michael Belgrave, kemiskinan dipandang sebagai masalah individual yang muncul karena kelemahan maupun pilihan individu yang terlibat. Michael Belgrave berpendapat bahwa kemiskinan akan menghilang secara alami jika kekuatan pasar diperluas secara maksimal serta pertumbuhan ekonomi didorong ke atas. Dalam pendekatan ini, strategi untuk mengatasi kemiskinan bersifat sementara, dengan peran negara yang minimal, melibatkan terutama keluarga, kelompok swadaya, dan lembaga keagamaan.<sup>22</sup>

##### 2) Paradigma Demokrasi Sosial

Paradigma demokrasi sosial mengasumsikan bahwa kemiskinan tidak disebabkan oleh faktor individual, melainkan oleh struktur sosial. Kemiskinan dipandang sebagai hasil dari ketidakadilan serta ketimpangan sosial yang terjadi karena sejumlah kelompok tidak memiliki akses yang cukup ke sumber daya sosial. Meskipun tidak menolak sistem kapitalis secara menyeluruh, kaum demokrasi sosial tidak setuju dengan prinsip

---

<sup>21</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, h.138

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 138-139

pasar bebas. Mereka melihat kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang efisien, tetapi mereka meyakini bahwa perlunya adopsi sistem negara kesejahteraan sebagai suplemen agar lebih manusiawi. Dalam pendekatan ini, peran negara dianggap penting, terutama dalam merumuskan strategi untuk mengatasi kemiskinan.<sup>23</sup>

### 2.1.2 Pengertian Kemiskinan

Berbagai kajian telah dilakukan mengenai kemiskinan, dan menghasilkan pemahaman yang beragam dari berbagai perspektif. Bank Dunia mengartikan kemiskinan merupakan situasi seseorang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dalam mengakses berbagai pilihan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti tidak memiliki tempat tinggal layak, tidak mampu mendapatkan perawatan medis ketika sakit, tidak dapat membaca dan menulis karena kurang akses pendidikan, serta tidak dapat mengakses sumber air bersih. Kemiskinan diartikan sebagai kekurangan kekuatan, keterwakilan, dan kebebasan.<sup>24</sup> Di sisi lain, BPS mendefinisikan konsep dasar kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, melalui pendekatan kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan non pangan, dimana pengukurannya dari sudut pandang pengeluaran.<sup>25</sup>

Shirazi dan Pramanik mengartikan kemiskinan sebagai keadaan dimana individu tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, mencakup aspek

---

<sup>23</sup> Ibid., h. 140

<sup>24</sup> Sa'adah Yuliana, et.al, "The Linkage of Human and Money Flows to Rural-Urban Fringe Poverty in South Sumatra, Indonesia: In an Islamic Perspective," *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol.7 No.4, h.240

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022, h.1

ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual.<sup>26</sup> Di lain sisi Todaro mengatakan bahwa kemiskinan merujuk pada seseorang atau kelompok orang yang sering kali menghadapi masalah kesehatan yang buruk, memiliki keterbatasan dalam literasi, mengalami pengangguran, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka sangat terbatas.<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang kemudian berimbas pada menurunnya kemampuan untuk mencapai standar hidup yang dianggap layak, termasuk dalam hal kesehatan, pendidikan, serta aspek lainnya.

### **2.1.3 Macam-Macam Kemiskinan**

Kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

#### **a. Kemiskinan Absolut**

Konsep ini mengaitkan kemiskinan dengan perbandingan antara pendapatan seseorang dan kebutuhan hidupnya. Seseorang dianggap miskin secara absolut yaitu apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tertentu yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Konsep tersebut memiliki tujuan untuk menetapkan tingkat pendapatan minimal yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Irfan Syauqi Beiq dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h.68

<sup>27</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid Satu*, Jakarta: Erlangga, 2011, h.289

<sup>28</sup> Nur Rianto al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.227

b. Kemiskinan Relatif

Dalam konsep ini, kemiskinan dipahami sebagai keadaan di mana seorang individu sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, akan tetapi masih berada di bawah standar sosial ekonomi yang ada di lingkungannya. Kemiskinan relatif terkait dengan perbedaan distribusi pendapatan dalam masyarakat.<sup>29</sup>

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merujuk pada ketidakmampuan masyarakat dalam sebuah sistem pemerintahan yang membuatnya ada dalam keadaan yang amat rentan serta terpinggirkan.<sup>30</sup>

#### 2.1.4 Faktor Penyebab Kemiskinan

Munculnya kemiskinan dalam suatu negara, terutama negara-negara berkembang, dapat disebabkan oleh manusia yang memiliki kebutuhan yang bervariasi. Suharto berpendapat bahwa setidaknya ada empat faktor yang dapat menjadi penyebab kemiskinan. Pertama, faktor individual, di mana seseorang dapat mengalami kemiskinan karena kondisi pribadinya, contohnya kecacatan permanen. Kedua, faktor sosial, yaitu kemiskinan timbul karena adanya diskriminasi sosial. Ketiga, faktor kultural, yaitu seseorang menghadapi kemiskinan akibat perilaku buruknya sendiri, misalnya malas bekerja. Keempat, faktor struktural, kemiskinan terjadi karena ketidakadilan dalam sistem ekonomi.<sup>31</sup>

Menurut Kuncoro, terdapat beberapa penyebab kemiskinan, diantaranya yaitu:

---

<sup>29</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015, h.302

<sup>30</sup> Nur Rianto al Arif, *Teori...*, h.228

<sup>31</sup> Irfan Syauqi, *Ekonomi...*, h.69-70

a. Ketidaksamaan dalam kepemilikan sumber daya

Wilayah dengan keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun alam, akan menghadapi kesulitan dalam pengelolaannya dibandingkan dengan daerah yang memiliki lebih banyak sumber daya. Kesulitan ini dapat berpengaruh pada kualitas barang yang diproduksi. Konsumen cenderung lebih memilih produk dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, rendahnya kualitas sumber daya dapat berdampak pada penurunan daya beli konsumen, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan.

b. Kualitas sumber daya manusia.

Kualitas rendah dari SDM disebabkan karena berbagai faktor seperti tingkatan pendidikan, nasib yang kurang baik, diskriminasi, atau faktor keturunan. Rendahnya kualitas SDM memiliki efek negatif pada tingkat produktivitas. Produktivitas yang rendah pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya tingkat upah, yang sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada tingkat produktivitas penduduknya, yang membutuhkan dukungan dari investasi dan sumber daya manusia yang memadai.

c. Perbedaan akses dan modal

Modal merupakan komponen penting dalam proses produksi. Ketersediaan akses modal yang memadai akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Di sisi lain, terbatasnya akses modal akan mengakibatkan penurunan produktivitas. Penurunan produktivitas ini kemudian

berdampak pada pendapatan yang lebih rendah, yang seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>32</sup>

Penyebab kemiskinan yang telah disebutkan awalnya berasal dari teori lingkaran setan kemiskinan yang diperkenalkan oleh Nurkse pada tahun 1953. Nurkse menyatakan bahwa "negara yang miskin menjadi miskin karena keadaannya yang miskin" atau "*a poor country is poor because it is poor.*" Lingkaran setan kemiskinan adalah serangkaian faktor yang saling mempengaruhi, menciptakan situasi di mana negara yang miskin akan tetap dalam kemiskinan dan sulit untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik.<sup>33</sup>

Teori lingkaran kemiskinan menggambarkan sebuah siklus tanpa akhir di mana semua faktor yang menyebabkan kemiskinan saling terhubung. Kemiskinan, atau ketidaksejahteraan, menghasilkan produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan masyarakat menurun, mengurangi dana yang tersedia untuk tabungan dan investasi. Penurunan investasi berdampak pada kurangnya modal. Kurangnya modal menghasilkan ketidaksempurnaan pasar dan keterbelakangan. Siklus ini terus berputar tanpa akhir, tanpa titik awal atau akhir yang jelas.

Faktor yang menyumbang angka kemiskinan ialah keterbelakangan manusia serta sumber daya alam (SDA). Pengelolaan SDA sangat tergantung pada kemampuan produktivitas manusia. Apabila mayoritas penduduknya miskin dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hal ini akan menyebabkan kekurangan dalam keterampilan teknis, pengetahuan, dan aktivitas kewirausahaan. Akibatnya, SDA yang ada bisa terbengkalai, tidak

---

<sup>32</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, h.107

<sup>33</sup> Resiska Septianingrum dan Deden Dinar Iskandar, "Determination Of Poverty At The District/City Level In Yogyakarta Province 2007-2018", *Journal of Economics Development and Sosial Research*, Vol.1 No.1 2021, h.31

berkembang, atau bahkan disalahgunakan. Kondisi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kurangnya SDA juga dapat menyebabkan kemiskinan, karena sumber daya alam merupakan kebutuhan pokok manusia. Kemiskinan sumber daya alam bisa menjadi penyebab dan juga akibat dari kemiskinan manusia.<sup>34</sup> Di sisi lain, kurangnya sumber daya manusia juga menjadi penyebab kemiskinan. Tanpa memiliki keterampilan, seseorang tidak akan memiliki pendapatan yang mencukupi, yang kemudian membatasi daya belinya dan mendorongnya masuk ke dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau negara, yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kekurangan sumber daya manusia juga akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.<sup>35</sup>

### **2.1.5 Indikator Kemiskinan**

Kemiskinan diartikan sebagai kurangnya kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan dan non makanan yang mana pengukurannya berdasarkan pengeluaran (BPS 2016). Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua bagian, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM merupakan jumlah pengeluaran minimal yang diperlukan untuk mencukupi asupan kalori harian sebesar 2100 kalori per kapita per hari, dengan paket komoditas dasar pangan mencakup berbagai jenis bahan makanan. Sementara itu, GKNM

---

<sup>34</sup> M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali, 2016, h.34

<sup>35</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia", *Equilibrium*, Vol. 6 No. 2, 2018, h. 220

mencakup kebutuhan dasar untuk perumahan, pakaian, pendidikan, serta kesehatan.<sup>36</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS), mencantumkan indikator-indikator dalam mengukur kemiskinan yaitu:

1. Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index* P0), merupakan persentase penduduk yang posisinya ada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* P1) adalah ukuran rata-rata disparitas pengeluaran masing-masing penduduk miskin dari Garis Kemiskinan. Jika nilai indeks ini tinggi, semakin besar pula jarak rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* P2) mencerminkan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Jika nilai indeks ini tinggi, maka semakin tinggi juga ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.<sup>37</sup>

### **2.1.6 Kemiskinan Perspektif Islam**

Dalam perspektif Islam, kemiskinan juga dianggap sebagai masalah yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Kemiskinan dipandang sebagai ancaman yang dapat membahayakan moralitas, kecerdasan, stabilitas keluarga, dan keseluruhan masyarakat. Dalam Islam, kemiskinan dianggap sebagai musibah dan krisis yang memerlukan perlindungan dari Allah terhadap potensi dampak negatifnya. Ketika kemiskinan meluas, risikonya adalah membuat manusia melupakan keberadaan Allah dan mengurangi empati sosial terhadap sesama.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Nia Aprilliyana, "Estimasi Indikator Kemiskinan Tingkat Kecamatan Menggunakan Regresi Kekar M-Kuantil", *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol. 3 No. 2, 2020, h.3

<sup>37</sup> Juergen J.E. Manopo, et.al, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Manado", *Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi*, Vol. 18 No.2, 2018, h.218

<sup>38</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8 No.2, 2018, h.179

Rasulullah SAW memaparkan betapa kemiskinan sangat berbahaya (kefakiran), terlebih lagi beliau memaparkan bahwa kefakiran mendekati kekufuran yang tercermin pada Hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda: kefakiran mendekati kekufuran.” (HR. Abu Dawud)

Menurut Manawy dalam Huda, hubungan antara kekafiran dan kekufuran sangat erat, karena kekufuran dapat menjadi langkah menuju kekafiran. Seseorang yang fakir miskin, umumnya cenderung merasa iri terhadap orang yang mampu dan kaya. Perasaan iri dan dengki dapat menghilangkan kebaikan dalam diri seseorang. Mereka mulai merasakan kehinaan dalam hati mereka, dan mencurahkan segala upaya untuk mencapai tujuan iri tersebut. Semua ini dapat merusak keyakinan agama dan membuat mereka tidak puas dengan takdir yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya membuat mereka menyalahkan rezeki yang diberikan kepada mereka. Meskipun hal tersebut belum termasuk dalam kekafiran, akan tetapi merupakan langkah menuju kekafiran itu sendiri.<sup>39</sup>

Al-Ghazali menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan hal-hal yang tidak diperlukan tidak dianggap sebagai kemiskinan.<sup>40</sup>

## 2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1961, Theodore W. Schultz pertama kali memperkenalkan teori modal manusia (*human capital*). Dalam teori *human capital* mengemukakan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten

---

<sup>39</sup> Nurul Huda dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015, h.24-25

<sup>40</sup> Ibid., h.23

sangat penting. SDM yang berkompeten dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Untuk mencapai SDM yang berkualitas, diperlukan pembentukan modal manusia atau *human capital*. Pembentukan ini dilakukan dengan cara memperoleh individu-individu yang memiliki karakter kuat, seperti tingkat keahlian dan pendidikan yang tinggi, sehingga mereka dapat menjadi aset penting dalam pembangunan.<sup>41</sup>

Berdasarkan teori *human capital* diatas dapat diartikan bahwa investasi dalam modal manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, meningkatkan produktivitas individu dan, pada gilirannya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

### **2.2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia**

Sumber daya manusia adalah kapasitas yang dimiliki oleh individu untuk mengimplementasikan perannya sebagai bagian dari masyarakat yang adaptif dan inovatif, dapat mengelola diri sendiri dan sumber daya alam dengan baik untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang dan berkelanjutan.<sup>42</sup> Sumber daya manusia adalah kunci utama dalam transformasi ekonomi, yaitu bagaimana menciptakan individu yang berkualitas, mempunyai keterampilan, dan daya saing tinggi dalam lingkup persaingan global.<sup>43</sup>

Peranan sumber daya manusia memiliki dalam proses pembangunan sangat vital. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM), semakin besar pula dorongan suatu negara maupun wilayah daerah untuk maju. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi penanda utama dalam menilai keberhasilan pembangunan. Dalam usaha meningkatkan IPM, hal yang harus difokuskan yaitu

---

<sup>41</sup> Amiruddin Idris, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h.49-50

<sup>42</sup> Sofyan Tsauri, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jember: STAIN Jember Press, 2013, h.1

<sup>43</sup> Dikson Junus, et.al., "Analisis Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato", *Economics and Digital Business Review*, Vol. 3 No.2, 2022, h.357

pada peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi keluarga. Ketiga aspek ini saling terkait. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan manusia, penting untuk mempertimbangkan secara menyeluruh semua aspek tersebut.<sup>44</sup>

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), Pembangunan manusia diartikan sebagai suatu proses memperbanyak pilihan-pilihan masyarakat (*people choice*). Berdasarkan beberapa opsi yang ada, terdapat tiga aspek yang dianggap krusial, yaitu: meningkatkan harapan hidup dan kesehatan, meningkatkan tingkat pendidikan, serta memastikan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak.<sup>45</sup>

Indeks Pembangunan manusia adalah indikator komposit yang digunakan untuk menilai rata-rata pencapaian suatu negara dalam tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup, tingkat pendidikan yang diwakili oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah pada populasi dewasa, serta tingkat kehidupan yang layak yang tercermin dalam pengeluaran per kapita.<sup>46</sup>

Pendidikan yang meningkat sering kali dihubungkan dengan pendapatan atau upah yang meningkat juga yang diterima seseorang. Jika upah mencerminkan produktivitas, individu dengan pendidikan tinggi yang disertai dengan pengalaman dan pelatihan yang luas, maka produktivitas juga akan meningkat. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi.

Kesehatan pun memiliki peran terhadap peningkatan pendapatan. Peningkatan kesehatan akan membuat partisipasi angkatan kerja juga meningkat. Lebih lanjut lagi, perbaikan dalam

---

<sup>44</sup> Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan*, Malang: UB Press, 2013, h. 109

<sup>45</sup> Nur Baeti, "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2 No.3, 2013, h.91

<sup>46</sup> Ibid

kesehatan juga akan membantu meningkatkan tingkat pendidikan dan pengembangan potensi individu, dan akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan yang meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia memiliki dampak pada penurunan angka kemiskinan. Kemajuan dalam sektor kesehatan, pendidikan serta pendapatan per kapita berkontribusi pada pembangunan manusia. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas manusia dalam satu wilayah, akan mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.

### **2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia Perspektif Islam**

Manusia dinilai sebagai aset berharga bagi suatu negara. Menurut Kuncoro yang dikutip oleh Prasetyoningrum, kualitas manusia yang meningkat merupakan kunci pokok dalam proses pembangunan. Dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam, disamping tauhid, *takziah an-nafs*, serta pemerintah, kualitas manusia pun mendapat perhatian lebih. Hal ini juga senada dengan pandangan Abdillah dalam Prasetyoningrum, bahwa manusia adalah agen pembangunan yang diberikan mandat Ilahi untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Terutama dalam konteks pelaksanaan pembangunan. Parameter kualitas manusia tercermin dalam hasil dan kontribusinya dalam produksi dan karya.<sup>47</sup>

Peran sumber daya manusia memiliki dampak signifikan dalam pembangunan di suatu negara. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memacu kemajuan pembangunan negara. Dalam pandangan Islam, manusia mempunyai dua peran utama sebagai hamba Allah sekaligus wakil Allah di dunia yang memiliki tugas untuk menjadikan bumi ini sejahtera.<sup>48</sup> Dalam Islam,

---

<sup>47</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia", *Equilibrium*, Vol. 6 No.2, 2018, h. 221

<sup>48</sup> Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianty, *Ekonomi Pembangunan Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 15

pembangunan hanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat, menjadi rahmat bagi seluruh manusia untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, bernilai, dan bebas dari penderitaan serta kemiskinan.

Allah berfirman di dalam QS. Al-Anbiya:107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>w</sup>

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua tindakan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah didasarkan pada rahmat dan kehendak-Nya, karena manusia ada untuk menunaikan tugas di dunia ini dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam proses membangun kesejahteraan, kehadiran manusia sangatlah penting, karena dalam pandangan Allah SWT, manusia adalah khalifah (pemimpin) di bumi ini.

### **2.3 Produk Domestik Regional Bruto**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan tersebut yaitu untuk mengurangi kemiskinan, yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dengan melihat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal tersebut berlandaskan pada teori *trickle-down effect* yang dikembangkan oleh Arthur Lewis pada tahun 1954.

Teori *trickle-down effect* menyatakan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Pada awalnya, manfaat

pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, pengaruh pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh PDRB terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung dari aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti kemiskinan akan berkurang jika nilai PDRB tinggi.<sup>49</sup>

### **2.3.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan sebuah indikator yang esensial dalam mengevaluasi keadaan ekonomi suatu wilayah pada rentang waktu tertentu, yang berpedoman atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan. Menurut BPS, PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah atau total nilai barang dan jasa akhir (bersih) yang diperoleh semua unit ekonomi.<sup>50</sup> Itulah mengapa setiap daerah memiliki nilai PDRB yang beragam.

Terdapat dua metode dalam menyajikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu:

a. PDRB atas harga berlaku

PDRB atas harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahun perhitungan.

b. PDRB atas harga konstan

---

<sup>49</sup> Sri Widyastuti, *Implementasi Etika Islam dalam Dunia Bisnis*, Jakarta: IRDH Book Publisher, 2019, h.23

<sup>50</sup> Sandra Logaritma, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*, Jakarta: BPS RI, h.5-6

PDRB atas harga konstan adalah berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun dasar.<sup>51</sup>

Dalam menghitung nilai PDRB, Badan Pusat Statistik menggunakan tiga pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, PDRB dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai unit produksi di suatu daerah selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan dalam perhitungan PDRB melibatkan penjumlahan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat di suatu wilayah selama periode waktu tertentu.

c. Pendekatan Pengeluaran

Metode pendekatan pengeluaran menyajikan nilai PDRB dengan menghitung total pengeluaran yang meliputi konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto.

Berdasarkan ketiga metode pendekatan perhitungan PDRB yang telah disebutkan di atas, pendekatan produksi adalah yang paling banyak digunakan. Metode tersebut membagi unit-unit produksi ke dalam sembilan produksi, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas, dan air bersih
5. Konstruksi

---

<sup>51</sup> Ibid., h.6

6. Perdagangan, hotel, dan restoran
7. Transportasi dan komunikasi
8. Bank dan lembaga keuangan lainnya, persewaan dan jasa perusahaan
9. Pemerintahan dan jasa lainnya.<sup>52</sup>

### **2.3.2 PDRB Menurut Perspektif Islam**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada satu wilayah. Beberapa ekonom menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sekadar mencakup aktivitas produksi semata, melainkan juga melibatkan berbagai kegiatan pada sektor produksi yang erat kaitannya dengan distribusi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya tentang kegiatan ekonomi, tetapi juga melibatkan upaya manusia dalam mencapai kemajuan material dan spiritual.

Dalam konteks ekonomi Islam, pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi bermula dari mengacu firman Allah dalam Q.S Hud ayat 61: “... *Dia yang telah menjadikanmu dari tanah dan menjadikanmu permakmurannya...*” Ayat tersebut menyiratkan bahwa Allah SWT menugaskan manusia sebagai khalifah untuk mengurus dan memakmurkan bumi.<sup>53</sup>

Istilah ‘pemakmuran bumi’ dapat terkait dengan pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dalam nasihat Ali bin Abi Thalib kepada gubernurnya di Mesir, dimana Ali bin Abi Thalib menekankan pentingnya memprioritaskan kemakmuran bumi di atas orientasi pemungutan pajak. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa fokus utama haruslah pada pemakmuran bumi, karena pajak hanya dapat dioptimalkan melalui pemakmuran tersebut. Menurutnya, jika

---

<sup>52</sup> Badan Pusat Statistik, *Laporan Akhir Analisis Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2016*, Yogyakarta: BPS Yogyakarta, 2017, h.14

<sup>53</sup> Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam”, *Maro: jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.1 No.2, 2018, h.119

pemungutan pajak tidak disertai dengan perhatian terhadap pemakmuran bumi, negara tersebut akan berada dalam kehancuran.<sup>54</sup>

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan yang berkelanjutan dari faktor produksi yang dilakukan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Dalam pandangan ekonomi Islam, peningkatan faktor produksi yang dihasilkan dari semua barang yang memiliki dampak buruk dan membahayakan manusia tidak dinilai sebagai pertumbuhan.<sup>55</sup>

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang juga terkait dengan penelitian ini antara lain:

**Tabel 2. 1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Aria Bhaswara Mohammad Bintang dan Nenik Woyanti	Pengaruh PDRB, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Serta Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan.

---

<sup>54</sup> Ibid., h.119

<sup>55</sup> Ibid

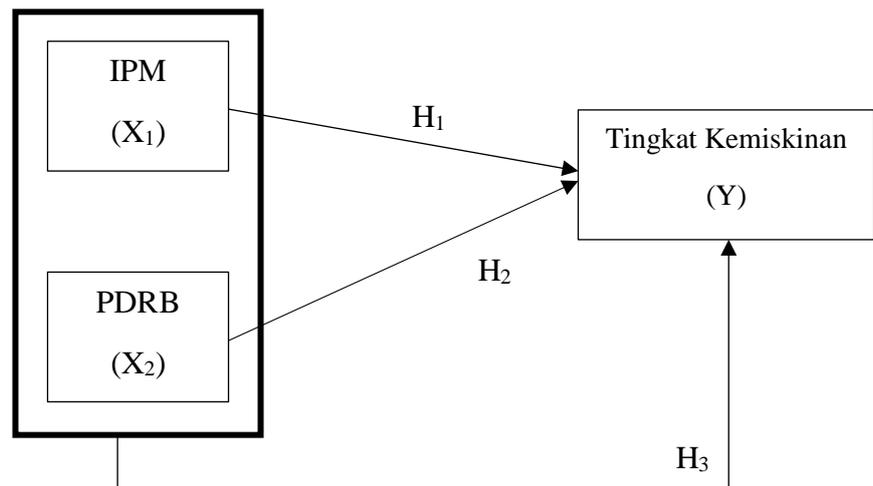
No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
2	Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan	Hasil dari penelitiannya adalah Upah Minimum Provinsi pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan
3	Ridho Andhykha, Herbiwati Retno Handayani, dan Nenik Woyanti	Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Laju pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
4	Safuridar, Natasya Ika Putri	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh Bagian Timur	IPM berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Aceh Bagian Timur. Pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan
5	M. Alhudori	Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap kemiskinan, PDRB berpengaruh

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
		Penduduk Miskin di Provinsi Jambi	negatif terhadap kemiskinan, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin
6	Arfan Ridhoni	Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 Perspektif Ekonomi Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan, Pengangguran berpengaruh signifikan, dan Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Meningkatnya kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung disebabkan karena kurangnya pemerintah menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan berekonominya. Dibutuhkan khalifah yang memiliki keempat sifat nabi agar kekayaan sumberdaya yang melimpah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kabupaten / kota di Provinsi Lampung, sehingga kesenjangan sosial dapat teratasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi yang diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian, maka perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan, objek yang diteliti serta periode pengamatan.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka pemikiran dapat dirumuskan sebagai berikut:



## 2.6 Hipotesis

Hipotesis adalah respons awal atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian.<sup>56</sup> Jawaban yang diberikan baru didasarkan kepada teori yang relevan, hipotesis dianggap sebagai dugaan yang masih perlu diuji kebenarannya melalui proses penelitian.<sup>57</sup> Hipotesis untuk penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### 1. Pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia berperan dalam menurunkan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia melibatkan sejumlah indikator komposit yaitu angka harapan hidup, tingkat melek huruf, dan konsumsi per kapita. Ketiga komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat produktivitas masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana masyarakat dalam memanfaatkan hasil dari proses pembangunan. Badan Pusat Statistik (BPS)

<sup>56</sup> Wahab, "Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Semarang", *Economica*, Vol.5, No.5, 2014, h.126

<sup>57</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, h.206

menyatakan bahwa tingkat IPM tinggi akan berdampak pada rendahnya persentase penduduk miskin.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridho Andhykha, Herbiwati Retno Handayani, dan Nenek Woyanti (2018) menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.<sup>59</sup> Temuan ini sejalan dengan pandangan Arsyad (2010) yang menyatakan bahwa salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pembangunan sumber daya manusia.<sup>60</sup>

H<sub>1</sub>: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan.

## 2. Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan aktivitas dalam sektor ekonomi yang menghasilkan tambahan barang dan jasa. Peran pertumbuhan ekonomi juga sangat krusial dalam usaha mengurangi angka kemiskinan. Menurut teori *trickel down effect*, antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, meningkatkan kemampuan produktif para pekerja, serta menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang baru.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2009, h.61

<sup>59</sup> Ridho Andhyka et.al. "Analisis pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran ,dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol.33 No.2, 2018, h.120

<sup>60</sup> Nurul Fadilah, Sukirman dkk, "Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM, dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013", *Eko-Regional*, Vol.11, No.1, 2016, h.22

<sup>61</sup> R. Bambang Budhijana, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2000-2017", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, Vol 5 No. 1, 2019, h.38

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari nilai PDRB yang tinggi, menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa, yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan lapangan kerja, sehingga membuat lebih banyak penduduk mendapatkan penghasilan yang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Alhudori (2017) menunjukkan hasil penelitian adanya korelasi negatif antara PDRB dengan tingkat kemiskinan.<sup>62</sup> Hal tersebut dapat diartikan kenaikan PDRB akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan

H<sub>2</sub>: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

### 3. Pengaruh IPM dan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan uraian mengenai pengaruh IPM dan PDRB yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: IPM dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

---

<sup>62</sup> M. Alhudori, "Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap penduduk Miskin di Provinsi Jambi", *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business* Vol. 1 No.1, h.124

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian kuantitatif merupakan cara menemukan pengetahuan yang menggunakan data angka untuk menemukan informasi.<sup>63</sup>

Penelitian kuantitatif digunakan dengan maksud untuk menemukan korelasi antar variabel, menguji hipotesis, serta mencari pola umum yang menggunakan nilai prediksi. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang bersifat numerik yang dapat diukur, diuji, dan dipresentasikan menjadi persamaan serta tabel.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) atau dikenal juga sebagai studi pustaka, yang merupakan aktivitas penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, baik melalui buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, maupun dokumen.<sup>64</sup>

##### **3.1.2 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat runtut waktu (*time series*) dalam rentang waktu 2019 hingga 2023. Data sekunder memuat informasi yang telah dikumpulkan penulis secara tidak langsung dari sumber yang telah tersedia sebelumnya.<sup>65</sup> Data sekunder yang dimaksud adalah catatan atau laporan historis yang telah tersedia dalam arsip dan sudah dipublikasikan sebelumnya, dan

---

<sup>63</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, h.37

<sup>64</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, h.3

<sup>65</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006, h.123

relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini diperoleh dari publikasi, laporan, atau dokumen yang tersedia melalui situs web resmi milik Badan Pusat Statistik (BPS).

### 3.2 Populasi dan Sampel

#### 3.2.1 Populasi

Populasi merupakan area generalisasi yang meliputi objek atau subjek dan memiliki karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti yang kemudian untuk dicari kesimpulannya.<sup>66</sup> Populasi pada penelitian ini ialah lima kabupaten dan dua kota yang berada di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan.

**Tabel 3.1**  
**Populasi Penelitian**

No.	Kabupaten / Kota
1	Kabupaten Batang
2	Kabupaten Pekalongan
3	Kabupaten Pemalang
4	Kabupaten Tegal
5	Kabupaten Brebes
6	Kota Pekalongan
7	Kota Tegal

#### 3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dari sumber data dan mencerminkan karakteristik populasi yang akan diteliti.<sup>67</sup> Pengambilan sampel data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.<sup>68</sup> Adapun sampel pada

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-23, Bandung: Alfabeta, 2016, h.80

<sup>67</sup> Ibid, h.81

<sup>68</sup> Ibid, h.85

penelitian ini adalah IPM, PDRB dan tingkat kemiskinan di tujuh kabupaten/kota wilayah Eks Karesidenan Pekalongan selama periode tahun 2019-2023.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah suatu teknik guna memperoleh data dan informasi berupa data-data tertulis yang dapat mendukung penelitian.<sup>69</sup> Dikarenakan menggunakan data sekunder, maka untuk memperoleh data penelitian dalam penelitian ini menggunakan data statistik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2019-2023 dengan laman [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id). Untuk data pendukung menggunakan referensi yang bersumber dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

### 3.4 Variabel Penelitian

#### 1. Variabel Bebas atau Independen (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat).<sup>70</sup> Pada penelitian ini menggunakan variabel independen sebagai berikut:

##### a. Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ )

Indeks Pembangunan manusia adalah parameter yang dipakai untuk menilai keberhasilan kualitas hidup suatu masyarakat, yang diukur melalui tiga aspek utama yakni kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang layak.<sup>71</sup> IPM memperlihatkan sejauh mana masyarakat menikmati manfaat pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, variabel IPM yang diambil adalah IPM wilayah Eks

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, h.476

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke-23*, Bandung: Alfabeta, 2016, h.39

<sup>71</sup> Adi Nugroho dan Clarissa Alvina, *Indeks Pembangunan Manusia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022, h.147

Karesidenan Pekalongan dari tahun 2019 hingga 2023, yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah dalam bentuk persentase.

b. Produk Domestik Regional Bruto ( $X_2$ )

Produk Domestik Regional Bruto mencerminkan total nilai tambah barang serta jasa yang diproduksi oleh semua sektor ekonomi di suatu daerah dalam rentang tahun tertentu.<sup>72</sup> Penelitian ini menggunakan data PDRB harga konstan selama periode 2019-2023 yang dinyatakan dalam satuan persen.

2. Variabel Terikat / Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.<sup>73</sup> Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.

Kemiskinan merujuk pada keadaan ketidakmampuan individu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan dan kebutuhan non-pangan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup.<sup>74</sup> Tingkat kemiskinan menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang telah diputuskan oleh BPS. Tingkat kemiskinan dinyatakan dalam satuan persen.

### 3.5 Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan langkah mengolah informasi yang sudah dikumpulkan guna menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS.

#### 3.5.1 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

---

<sup>72</sup> Sandra Logaritma, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020, h.5-6

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015, h.12

Uji Normalitas merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah data yang dihasilkan dari terdistribusi normal ataupun tidak. Hasil uji normalitas harus terdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi  $>0,05$  berarti data terdistribusi normal
- b. Jika nilai signifikansi  $<0,05$  berarti data tidak terdistribusi normal.<sup>75</sup>

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi kuat antar variabel independen yang digunakan. Pengukuran uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai VIF serta nilai *Tolerance*. Ketentuan uji multikolinieritas adalah apabila nilai *Tolerance*  $>0,1$  dan nilai VIF  $<10$  maka dapat dikatakan data penelitian tidak terjadi multikolinieritas, sedangkan apabila nilai *Tolerance*  $<0,1$  dan nilai VIF  $>10$  maka dapat disimpulkan terjadi multikolinearitas.<sup>76</sup>

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian residual antara yang satu dengan yang lain.<sup>77</sup> Data penelitian yang baik yaitu yang hasil pengujiannya tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*, Ponorogo: Wade Group, 2016, h. 108

<sup>76</sup> Ce Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h.133

<sup>77</sup> Zumrotun Nafiah dan Warno, "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)", *Jurnal STIE Semarang*, Vol.10 No.1, 2018, h.98

<sup>78</sup> Latan Hengky dan Selva Temalagi, *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*, Bandung: Alfabeta, 2013, h.63

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu rentang waktu tertentu dengan kesalahan pengganggu sebelumnya.<sup>79</sup> Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW).<sup>80</sup> Secara umum patokan yang digunakan dalam melihat angka DW yakni:

1. Angka D-W di bawah -2 artinya terdapat autokorelasi positif
2. Angka D-W di bawah -2 sampai +2 artinya tidak terdapat autokorelasi
3. Angka D-W di atas +2 artinya terdapat autokorelasi negatif.

#### 3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi berganda adalah analisis yang dilakukan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen.<sup>81</sup> Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi untuk Variabel  $X_1$

$\beta_2$  = Koefisien regresi untuk Variabel  $X_2$

$X_1$  = Variabel Independen 1

$X_2$  = Variabel Independen 2

$\epsilon$  = Error

---

<sup>79</sup> Indah Lestari dan Ega Suhada, "Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak", *The Asia Pasific Journal of Management*, Vol.7 No. 2, 2020, h.95

<sup>80</sup> Ana Zahrotun Nihayah, *Pengolahan Data Penelitian Menggunakan Software 23.0*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, h.7

<sup>81</sup> Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008, h.150

### 3.5.3 Uji Hipotesis

#### 1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak.<sup>82</sup> Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Penentuan apakah hipotesis diterima atau ditolak bergantung pada kriteria berikut: jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis akan ditolak (menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan). Ini mengindikasikan bahwa secara parsial, variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima (menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan). Hal ini menandakan bahwa secara parsial, variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.<sup>83</sup>

#### 2. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji F ini adalah 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Pengambilan keputusan mengenai apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan pada kriteria berikut: jika nilai signifikansi F melebihi 0,05, maka hipotesis akan ditolak, yang menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan. Artinya, variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi F

---

<sup>82</sup> Latan Hengky dan Selva Temalagi, *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 63

<sup>83</sup> Irawan Jati Kusumo dan Etna Nur Afri Yuyetta, "Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit", *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 8 No. 1, 2018, h.6

kurang dari atau sama dengan 0,05, hipotesis akan diterima, menandakan bahwa koefisien regresi signifikan secara bersama-sama. Hal tersebut membuktikan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.<sup>84</sup>

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa efektif variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada model regresi yang dilihat melalui nilai *R square*.<sup>85</sup> Rentang nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai koefisien determinasi yang rendah atau mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, apabila nilainya mendekati satu menandakan bahwa variabel independen nyaris sempurna dalam memberikan informasi yang dibutuhkan tentang variabel dependen.

---

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup>Nurudin, "Pengaruh Sharia Marketing terhadap Loyalitas Anggota KSPPS BMT Walisongo Semarang", *Jurnal Muqtasid*, Vol.8 No.1, 2017, h.37

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Eks Karesidenan Pekalongan**

Karesidenan merupakan suatu pembagian wilayah administratif dalam sebuah Provinsi pada masa Hindia-Belanda hingga tahun 1950-an. Wilayah Karesidenan tidak tersebar di seluruh Indonesia, melainkan terbatas pada pulau-pulau seperti Jawa, Sumatra, Lombok, dan Sulawesi. Karesidenan biasanya dibentuk di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Saat ini, sistem keresidenan sudah tidak berlaku, dan istilah tersebut umumnya hanya digunakan secara informal. Meskipun begitu, istilah keresidenan masih sering digunakan untuk mengelompokkan tanda kendaraan namun masih digunakan secara informal. Istilah Karesidenan sering digunakan dalam konteks pengelompokan tanda kendaraan di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Tengah, Eks Karesidenan dikelompokkan menjadi enam wilayah antara lain: Eks Karesidenan Surakarta, Eks Karesidenan Pati, Eks Karesidenan Kedu, Eks Karesidenan Semarang, Eks Karesidenan Pekalongan, serta Eks Karesidenan Banyumas. Dalam konteks penelitian ini, wilayah yang dijadikan fokus penelitian adalah Eks Karesidenan Pekalongan, yang terdiri dari lima Kabupaten dan dua Kota wilayah administratif, yaitu:

- 1) Kabupaten Batang
- 2) Kabupaten Pekalongan
- 3) Kabupaten Pemasang
- 4) Kabupaten Tegal
- 5) Kabupaten Brebes
- 6) Kota Tegal

7) Kota Pekalongan

**Gambar 4. 1**  
**Peta wilayah Eks Karesidenan Pekalongan**



**A. Kabupaten Batang**

Kabupaten Batang terletak di antara 60 51' 46" dan 70 11' 47" Lintang Selatan dan antara 1090 40' 19" dan 1100 03' 06" Bujur Timur. Lokasinya berada di sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa, membentang dari wilayah pantai hingga dataran tinggi mendekati wilayah Dieng, yang secara rinci berbatasan dengan:

Sebelah barat : Kabupaten dan Kota Pekalongan

Sebelah selatan : Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara

Sebelah timur : Kab. Kendal

Sebelah utara : laut Jawa

Kabupaten Batang terdiri dari 15 Kecamatan dengan luas wilayah 78.864,16 Ha. Mayoritas wilayahnya (81,58%) adalah lahan pertanian, sementara sisanya (18,42%) merupakan lahan non pertanian. Lahan pertanian utamanya digunakan untuk sawah dengan sebagian besar menggunakan irigasi persawahan sedangkan lahan non pertanian digunakan untuk berbagai keperluan seperti tegal/kebun, perkebunan, hutan negara, dan lainnya.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Kabupaten Batang dalam Angka 2024, Batang: BPS Kabupaten Batang, 2024, h.5

## **B. Kabupaten Pekalongan**

Kabupaten Pekalongan terletak di antara  $6^{\circ} - 7^{\circ}23'$  Lintang Selatan dan antara  $109^{\circ} - 109^{\circ}78'$  Bujur Timur. Wilayahnya terbentang sepanjang pantai utara Laut Jawa, dan berbatasan dengan:

Sebelah utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan

Sebelah timur : Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan

Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah barat : Kabupaten Pemalang

Luas wilayah Kabupaten Pekalongan yaitu sekitar 836.15 km<sup>2</sup>, terbagi menjadi 19 kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut, 11 diantaranya merupakan desa pantai, sementara 274 lainnya bukan desa pantai. Apabila dilihat dari segi topografi, wilayah tersebut memiliki 219 desa/kelurahan di wilayah dataran rendah dan 66 desa/kelurahannya lain terletak di wilayah dataran tinggi.<sup>87</sup>

## **C. Kabupaten Pemalang**

Kabupaten Pemalang terletak di antara  $6^{\circ}52'30'' - 7^{\circ}20'11''$  Lintang Selatan (LS) dan antara  $109^{\circ}17'30'' - 109^{\circ}40'30''$  Bujur Timur (BT). Secara administratif, Kabupaten Pemalang secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah selatan : Kab. Purbalingga

Sebelah timur : Kab. Pekalongan

Sebelah barat : Kab. Tegal

Kabupaten Pemalang memiliki 14 kecamatan dan 223 desa/kelurahan. Luas wilayahnya sebesar 1.115,30 Km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan luas terbesar yaitu Kecamatan Bantarbolang

---

<sup>87</sup> Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2024, Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2024, h.3

dengan persentase 12,48 persen, diikuti Kecamatan Watukumpul (11,57%) dan Kecamatan Belik (11,17%).<sup>88</sup>

#### **D. Kabupaten Tegal**

Kabupaten Tegal terletak antara 108° 57' 6" – 109° 21' 30" Bujur Timur dan 6° 50' 41" - 7° 15' 30" Lintang Selatan. Kabupaten Tegal secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa

Sebelah selatan : Kab. Brebes dan Kab. Banyumas

Sebelah timur : Kab. Pemalang

Sebelah barat : Kab. Brebes

Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah 983,9 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 18 kecamatan. Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 kategori daerah, yaitu:

- a. Daerah pantai, yang mencakup Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja.
- b. Daerah dataran rendah, termasuk Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- c. Daerah dataran tinggi/pegunungan yang meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.<sup>89</sup>

#### **E. Kabupaten Brebes**

Kabupaten Brebes adalah kabupaten yang terakhir yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Secara astronomis, Kabupaten Brebes terletak antara 6°44' – 7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' – 109°11' Bujur Timur.

---

<sup>88</sup> Kabupaten Pemalang dalam Angka 2024, Kabupaten Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang, 2024, h.5

<sup>89</sup> Kabupaten Tegal dalam Angka 2024, Kabupaten Tegal: BPS Kabupaten Tegal, 2024, h.5

Dilihat dari posisi geografisnya, Kabupaten Brebes berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas

Sebelah Barat : Provinsi Jawa barat

Sebelah Timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal

Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah seluas 1.769,62 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 297 Desa/Kelurahan. Penggunaan tanah di wilayah tersebut dibedakan menjadi tanah sawah dan tanah bukan sawah. Tanah sawah mencakup luas sebesar 627,03 km<sup>2</sup> (37,70%), sementara tanah bukan sawah mencakup sebesar 1.035,93 km<sup>2</sup> (62,30%).<sup>90</sup>

#### **F. Kota Tegal**

Kota Tegal terletak di antara 109<sup>0</sup>04'28" hingga 109<sup>0</sup>09'41" garis Bujur Timur dan 06<sup>0</sup>50'21" sampai 06<sup>0</sup>54'00" garis Lintang Selatan. Secara geografis, Kota ini terletak pada pertemuan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta.

Kota Tegal berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Tegal

Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal

Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

Kota Tegal memiliki luas wilayah 39,14 km<sup>2</sup>, secara administrasi Kota Tegal terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 27 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Margadana, mencapai 13,28 km<sup>2</sup> atau sekitar 33,93 persen dari total luas wilayah Kota Tegal.<sup>91</sup>

#### **G. Kota Pekalongan**

Kota Pekalongan berada di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas

---

<sup>90</sup> Kabupaten Brebes dalam Angka 2024, Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2024, h.4

<sup>91</sup> Kota Tegal dalam Angka 2024, Kota Tegal: BPS Kota Tegal, 2024, h.7

permukaan laut. Secara geografis, Kota Pekalongan terletak antara 6<sup>0</sup> 50' 42" sampai dengan 6<sup>0</sup> 55'44" lintang selatan dan 109<sup>0</sup> 37' 55" bujur timur sampai dengan 109<sup>0</sup> 42' 19". Secara administratif, Kota Pekalongan berbatasan dengan:

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah timur : Kab. Batang

Sebelah selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang

Sebelah barat : Kab. Pekalongan

Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan memiliki luas sebesar 4.525 Ha atau 0,14 persen dari luas wilayah Jawa Tengah.<sup>92</sup>

## 4.2 Gambaran Umum Variabel

### 4.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seorang individu atau sekelompok orang yang mengalami kekurangan harta benda berharga, baik berupa uang, maupun modal lainnya seperti pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, serta kesempatan untuk mengakses fasilitas pelayanan umum, pendidikan, serta lapangan pekerjaan. Kemiskinan bisa ditimbulkan oleh kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, maupun kesulitan dalam menjangkau pendidikan dan memperoleh pekerjaan.

Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan memiliki prosesi yang strategis karena terletak di jalur pantura, namun tetap menjadi kantong kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Berikut ini gambaran mengenai kemiskinan yang ada di wilayah tersebut.

---

<sup>92</sup> Kota Pekalongan dalam Angka 2024, Kota Pekalongan: BPS Kota Pekalongan, 2024, h.7-

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Pekalongan periode**  
**2019-2023**

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Batang	8.35	9.13	9.68	8.98	8.92
2	Kabupaten Pekalongan	9.71	10.19	10.57	9.67	9.67
3	Kabupaten Pemalang	15.41	16.02	16.56	15.06	15.03
4	Kabupaten Tegal	7.64	8.14	8.60	7.90	7.30
5	Kabupaten Brebes	16.22	17.03	17.43	16.05	15.78
6	Kota Pekalongan	6.60	7.17	7.59	7.00	6.81
7	Kota Tegal	7.47	7.80	8.12	7.91	7.68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa tingkat kemiskinan terbesar wilayah Eks Karesidenan Pekalongan terletak di Kabupaten Brebes, yang selama lima tahun berturut-turut selalu diatas 10%. Kemudian, Kabupaten Pemalang mengikuti dengan proporsi penduduk miskin yang hampir sama dengan Kabupaten Brebes. Sementara itu, kawasan perkotaan seperti Kota Pekalongan serta Kota Tegal, menunjukkan tingkat kemiskinan yang jauh di bawah 10% selama lima tahun terakhir. Begitu pula dengan wilayah dekat kawasan perkotaan seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan serta Kabupaten Tegal yang juga memiliki tingkat kemiskinan dibawah 10% selama lima tahun berturut-turut.

Seperti yang terlihat pada tabel 4.1, kemiskinan ekstrem terdapat di Kabupaten Brebes serta Kabupaten Pemalang. Secara ekonomi, keduanya memiliki kesamaan yaitu sebagai kabupaten yang bergantung pada sektor ekonomi primer, terutama pertanian dan pertambangan. Di sisi lain, kawasan perkotaan seperti Kota Tegal dan Kota Pekalongan,

serta daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Tegal serta Kabupaten Pekalongan, memiliki persentase tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa dari tujuh Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, dua diantaranya masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, yakni di atas 10%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kabupaten tersebut merupakan daerah yang menjadi kantong kemiskinan di wilayah tersebut.

#### 4.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan sebagai parameter dalam mengevaluasi capaian pembangunan manusia. Indikator-indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM meliputi angka harapan hidup, gabungan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang merefleksikan pencapaian pembangunan untuk kehidupan yang layak.

**Tabel 4.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Eks**  
**Karesidenan Pekalongan 2019-2023**

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Batang	68.42	68.65	68.92	69.45	70.20
2	Kab. Pekalongan	69.71	69.63	70.11	70.81	71.40
3	Kab. Pemasang	66.32	66.32	66.56	67.19	68.03
4	Kab. Tegal	68.24	68.39	68.79	69.53	70.23
5	Kab. Brebes	66.12	66.11	66.32	67.03	67.95
6	Kota Pekalongan	74.77	74.98	75.40	75.90	76.71
7	Kota Tegal	74.93	75.07	75.52	76.15	77.02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Pekalongan dalam rentang waktu lima tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2019, Kabupaten Batang memiliki IPM mencapai 68,42% kemudian selang lima tahun yaitu pada 2023 terjadi peningkatan menjadi 70,20%. IPM Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 adalah 69,71% dan meningkat menjadi 71,40% pada tahun 2023. IPM Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 adalah 66,32% dan mengalami peningkatan menjadi 68,03% pada tahun 2023. IPM Kabupaten Tegal pada tahun 2019 adalah 68,24% dan meningkat menjadi 70,23% pada tahun 2023. IPM Kabupaten Brebes pada tahun 2019 adalah 66,12% dan meningkat menjadi 67,95% pada tahun 2023. IPM Kota Pekalongan pada tahun 2019 adalah 74,77% dan meningkat menjadi 76,71% pada tahun 2023. Sedangkan IPM Kota Tegal pada tahun 2019 adalah 74,93% dan meningkat menjadi 77,02% pada tahun 2023.

#### **4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan ekonomi suatu daerah. Nilai PDRB menjadi representasi kapabilitas pemerintah dalam mengelola SDA serta faktor produksi di wilayahnya.

Terdapat dua pendekatan umum yang digunakan dalam perhitungan PDRB, yaitu PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku mengukur nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga saat penghitungan, sementara PDRB atas harga konstan menggunakan harga pada tahun tertentu yang disebut sebagai tahun dasar.

Penelitian ini menggunakan data PDRB atas harga konstan tahun dasar 2010 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Berikut

merupakan data PDRB wilayah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Pekalongan.

**Tabel 4.3**  
**PDRB Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Eks**  
**Karesidenan Pekalongan**

No.	Kabupaten / Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Batang	5.39	-1.29	4.88	5.97	5.53
2	Kab. Pekalongan	5.35	-1.89	3.54	5.11	5.14
3	Kab. Pemalang	5.80	-0.61	4.28	5.08	4.14
4	Kab. Tegal	5.56	-1.48	3.71	5.13	4.93
5	Kab. Brebes	5.76	-0.47	2.57	5.61	3.74
6	Kota Pekalongan	5.50	-1.87	3.59	5.76	5.44
7	Kota Tegal	5.77	-2.29	3.12	5.16	5.01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari data pada tabel 4.3 tersebut, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yakni pada tahun 2019–2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, Kabupaten Pemalang mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,80%, diikuti oleh Kota Tegal dengan nilai 5,77% serta Kabupaten Brebes dengan nilai 5,76%. Sedangkan pada tahun 2023, Kabupaten Batang mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 5,53%, diikuti oleh Kota Pekalongan dengan nilai 5,44%, serta Kabupaten Pekalongan dengan nilai 5,14%.

#### 4.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh IPM dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan selama periode tahun 2019-2023, langkah awalnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah

untuk mengetahui apakah terjadi pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik sebelum melakukan analisis.

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data pada model regresi, nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian yang baik yaitu harus terdistribusi normal.<sup>93</sup> Penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*.

Kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu, Apabila nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $> \alpha$  0,05 artinya data berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $< \alpha$  0,05 artinya data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

#### Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.41716303
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.085
	Negative	-.100
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Output SPSS diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* tersebut terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar

<sup>93</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Multivariat dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018) h. 161

0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang menandakan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Uji multikolinearitas dilaksanakan dengan berpatokan pada *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* < 0,10 maka artinya terjadi masalah multikolinearitas.<sup>94</sup>

**Tabel 4.5**  
**Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	64.947	8.387		7.744	.000		
IPM	-.771	.119	-.753	-6.476	.000	.996	1.004
PDRB	-.015	.159	-.011	-.094	.925	.996	1.004

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber: Output SPSS diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa:

- Variabel IPM memiliki nilai tolerance sebesar 0,996 yang berarti > 0,10 dan VIF 1,004 yang berarti < 10. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel IPM.
- Variabel PDRB memiliki nilai tolerance senilai 0,996 yang berarti nilai tersebut > 0,10 dan VIF 1,004 yang berarti < 10. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel PDRB.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang

<sup>94</sup> Ibid., h. 107

lain. Apabila varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas.<sup>95</sup>

Pengambilan keputusan yaitu dengan melihat nilai signifikansi dari variabel bebasnya. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai sig. < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas.
- b. Apabila nilai sig. > 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas.<sup>96</sup>

Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

			<b>Correlations</b>		
			IPM	PDRB	Unstandardized Residual
Spearman's rho	IPM	Correlation Coefficient	1.000	.046	-.248
		Sig. (2-tailed)	.	.794	.150
		N	35	35	35
	PDRB	Correlation Coefficient	.046	1.000	-.088
		Sig. (2-tailed)	.794	.	.615
		N	35	35	35
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.248	-.088	1.000
		Sig. (2-tailed)	.150	.615	.
		N	35	35	35

Sumber: Output SPSS diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Variabel IPM memiliki nilai sig. 0,150 yang berarti > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Variabel PDRB memiliki nilai sig. 0,615 yang berarti > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

<sup>95</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Multivariat dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018) h.137

<sup>96</sup> Riyanto dan A A Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, h.148

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode sebelumnya  $(t-1)$ .<sup>97</sup> Model regresi yang baik yaitu bebas autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson (uji  $dw$ ). Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah  $du < d < 4 - du$  yang berarti tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.<sup>98</sup>

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.801 <sup>a</sup>	.642	.619	1.61615	1.703

a. Predictors: (Constant), LAG\_X2, LAG\_X1

b. Dependent Variable: LAG\_Y

Sumber: Output SPSS diolah

Syarat dikatakan tidak terdapat gejala autokorelasi adalah  $du < d < 4 - du$

Diketahui  $N=35$  dan  $K=2$

Nilai  $DL= 1,3433$

Nilai  $DU= 1,5838$

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,703, nilai tersebut lebih besar dari  $du$  (1,5838) dan lebih kecil dari  $4-du$  (2,4162).

$$DU < D < 4 - DU = 1,5838 < 1,703 < 2,4162.$$

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan yaitu data tersebut tidak terjadi autokorelasi.

---

<sup>97</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Multivariat dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018) h. 111

<sup>98</sup> *Ibid.*, h.112

#### 4 Uji Hipotesis

##### 1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen<sup>99</sup>. Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah variabel IPM ( $X_1$ ) dan PDRB ( $X_2$ ) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan ( $Y$ ). Dasar pengambilan keputusan hasil pengujian menggunakan nilai signifikansi. Jika nilai t signifikansinya  $< 0,05$  artinya variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai t signifikansi  $> 0,05$  artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64.947	8.387		7.744	.000
	IPM	-.771	.119	-.753	-6.476	.000
	PDRB	-.015	.159	-.011	-.094	.925

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber: Output SPSS diolah

$$\begin{aligned} T \text{ tabel} &= ((\alpha/2) ; (n-k-1)) \\ &= ((0,05 : 2) ; (35-2 -1)) \\ &= (0,025 ; 32) \\ &= 2,03693 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas dapat dilihat hasil sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan

---

<sup>99</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Multivariat dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018) h. 98

IPM memiliki nilai sig. 0,000 yang berarti kurang dari nilai 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) serta nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-6,476 > 2,03693$ ) maka  $H_1$  diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa IPM ( $X_1$ ) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y). Nilai  $t_{hitung}$  negatif menunjukkan  $X_1$  memiliki hubungan yang berlawanan dengan Y.

- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan

PDRB memiliki nilai signifikansi 0.925 yang artinya lebih besar dari 0,05 ( $0,925 > 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0.094 < 2,03693$ ). Nilai  $t_{hitung}$  negatif menunjukkan  $X_2$  memiliki hubungan yang berlawanan dengan Y. Berdasarkan pengujian itu, maka  $H_2$  ditolak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

## 2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ ) dan Produk Domestik Regional Bruto ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh secara simultan pada variabel terikat tingkat kemiskinan (Y). Berikut hasil uji simultan (Uji F) :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	261.819	2	130.909	21.088	.000 <sup>b</sup>
Residual	198.651	32	6.208		
Total	460.470	34			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), PDRB, IPM

Sumber: Output SPSS diolah

$$F_{tabel} = (k ; n-k)$$

$$= (2 ; 35-2)$$

$$= (2 ; 33)$$

$$= 3,28$$

Berdasarkan tabel hasil uji f diperoleh nilai tingkat signifikan sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan F hitung 21,088 lebih besar dari F tabel sebesar 3,28 ( $21,088 > 3,28$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independen) yang terdiri dari IPM ( $X_1$ ) dan PDRB ( $X_2$ ) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y).

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen (X) dalam mempengaruhi variabel dependen (Y) yang dilihat dari nilai R Square.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.754 <sup>a</sup>	.569	.542	2.49155

a. Predictors: (Constant), PDRB, IPM

Sumber: Output SPSS diolah

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang terlihat dalam Adjusted R Square adalah sebesar 0,542. Hal tersebut mengandung arti bahwa pengaruh variabel IPM dan PDRB secara simultan terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 54,2%. Sedangkan 45,8% dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen dan dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika (regresi). Model analisis regresi linear berganda digunakan untuk menggambarkan dan menilai seberapa signifikan

hubungan antara beberapa variabel independen dan variabel dependen serta seberapa besar dampaknya terhadap variabel dependen.<sup>100</sup>

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda dipakai untuk melihat pengaruh IPM dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Model Regresinya adalah  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$ .

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	64.947	8.387		7.744	.000
IPM	-.771	.119	-.753	-6.476	.000
PDRB	-.015	.159	-.011	-.094	.925

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber: Output SPSS diolah

Berdasarkan hasil regresi berganda didapatkan konstanta untuk variabel  $X_1$  sebesar -0,771, dan untuk variabel  $X_2$  sebesar -0,015 dengan konstanta keseluruhan 64,947. Oleh karena itu, persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = 64,947 - 0,771 \text{ IPM} - 0,015 \text{ PDRB} + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda diatas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) yaitu 64,947 yang berarti, apabila nilai dari kedua variabel bebas (X) yaitu IPM dan PDRB berada pada nilai konstan atau nol, maka tingkat kemiskinan akan memiliki nilai sebesar 64,947%.
- b. Koefisien regresi untuk variabel  $X_1$  (IPM) didapatkan nilai koefisien ( $b_1$ ) sebesar -0,771, yang menunjukkan bahwa perubahan satu persen

<sup>100</sup> Ibid., h.95

pada IPM akan mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,771% atau sebaliknya.

- c. Koefisien regresi untuk variabel  $X_2$  (PDRB) didapatkan nilai koefisien ( $b_2$ ) sebesar - 0,015, nilainya bernilai negatif atau memiliki pengaruh negatif, yang menandakan bahwa peningkatan satu persen pada PDRB akan mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,015%, begitu pula sebaliknya.

#### **4.5 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan**

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel IPM ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari nilai alfa 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -6,476 lebih besar dari  $t_{tabel}$  2,03693. Dikarenakan nilai  $t_{hitung}$  bersifat negatif, maka hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan bersifat berlawanan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima, atau dapat diinterpretasikan bahwa adanya pengaruh negatif yang signifikan dari variabel IPM terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang terdapat di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Sebagai faktor produksi, kualitas seorang manusia diukur oleh kondisi fisiknya, tingkat pendidikannya, serta keterampilannya. Manusia yang berkualitas tinggi memiliki tubuh yang sehat dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang memadai.<sup>101</sup> Hal itu berarti kemiskinan dipengaruhi oleh kualitas diri individu, sehingga

---

<sup>101</sup> Bambang Pudjianto dan M. Syawie, "Kemiskinan dan Pembangunan Manusia", *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol.1 No.3*, 2015, h.242

peningkatan kualitas diri diperlukan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Menurut teori lingkaran kemiskinan Nurkse, keterkaitan antara produktivitas yang rendah atau kurangnya kualitas sumber daya manusia akan menyebabkan pendapatan yang rendah atau kemiskinan. Pendidikan formal dan non formal memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Ini dapat terjadi baik secara tidak langsung melalui perbaikan serta peningkatan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dengan demikian, seiringnya berjalannya waktu akan meningkatkan pendapatan mereka.<sup>102</sup>

Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di dalam wilayah dapat membuat produktivitas penduduk ikut meningkat, memungkinkan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika produktivitas masyarakat meningkat, pendapatan mereka juga akan meningkat. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat dapat mencapai standar hidup yang lebih baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018) menegaskan bahwa IPM memiliki dampak dalam memangkas angka kemiskinan. Fokus peningkatan IPM terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan, dinilai sangat penting untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas.

Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini juga dilakukan oleh Andykha, dkk (2018) berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa

---

<sup>102</sup> Roy Kristanto Lumban Tobing, et.al, “Analisis Pengaruh Human Capital, Angkatan Kerja, dan Pendidikan Terhadap Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2006-2022”, *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, Vol 3 No.2, 2023, h.20

Tengah”<sup>103</sup> yang menyimpulkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, menunjukkan hubungan yang tidak searah antara IPM dengan tingkat kemiskinan. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadila dan Marwan (2020), Rorong (2022), serta Azriansyah (2022).

Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara Indeks Pembangunan Manusia dengan tingkat kemiskinan, mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan, kesehatan dan pengeluaran seseorang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, jika Indeks Pembangunan Manusia meningkat, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun.

Dalam perspektif Islam, Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Konsep kesejahteraan manusia dalam Islam tidak hanya mencakup materiil, akan tetapi juga spiritual dan moral yang lebih luas. Oleh sebab itu, IPM dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di suatu daerah dalam konteks Islam. IPM juga dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang secara implisit terkait dengan IPM dan pengaruhnya terhadap kemiskinan, seperti dalam QS. At – Tin 95 : 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ؛<sup>ط</sup>

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

---

<sup>103</sup> Ridho Andhykha et.al, “Analisis pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”, *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol.33 No.2, 2018, h. 120

Dalam tafsir Quraisy Shihab, manusia dianggap sebagai makhluk paling sempurna dan istimewa yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Dalam penciptaannya, manusia diberikan bentuk yang indah, fitrah yang baik, serta akal yang sehat. Karena itu, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan memahami lingkungan sekitar mereka, yang pada gilirannya memberi kesempatan bagi pengembangan potensi mereka. Dalam Islam, setiap individu diperintahkan untuk terus meningkatkan kualitas diri mereka guna mencapai tujuan hidup.

## **2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat diketahui bahwa variabel PDRB ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikansi 0.925, yang lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ( $0,925 > 0,05$ ). Selain itu, nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel PDRB juga lebih kecil dari  $t_{tabel}$   $-0.094 < 2,03693$ . Dengan nilai  $t_{hitung}$  yang negatif, menandakan adanya hubungan yang tidak searah antara PDRB dengan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak. Hal tersebut berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Kesimpulannya, PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis awal penelitian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan PDRB tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan selama periode penelitian tersebut. Berarti jika PDRB mengalami kenaikan maka tidak akan berpengaruh pada pengurangan angka kemiskinan selama rentang waktu tersebut. Bahkan, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat golongan miskin tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan untuk mengangkatnya ke atas garis kemiskinan.

Ketidakberpengaruhannya PDRB terhadap penurunan tingkat kemiskinan dikarenakan adanya ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan ke seluruh wilayah di Eks Karesidenan Pekalongan. Hal ini menyebabkan hanya sebagian kecil golongan yang dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Distribusi ekonomi memiliki dampak yang penting dikarenakan dapat memastikan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, menjamin keseimbangan dalam distribusi pendapatan dan juga kekayaan, serta mengurangi kesenjangan ekstrem antar berbagai kelompok masyarakat.

Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi dianggap positif jika distribusinya seimbang, sehingga tidak timbul disparitas di antara individu maupun wilayah. Distribusi tersebut harus menjadi tanggung jawab negara agar dapat dijalankan secara efektif dan berlaku bagi seluruh warga negara. Negara bertanggung jawab untuk memastikan aliran kekayaan dari kelompok yang lebih mampu kepada kelompok yang kurang mampu melalui berbagai instrumen kebijakan seperti zakat, pajak, dan mekanisme yang lainnya, untuk tercapainya stabilitas sosial, ekonomi, serta politik seperti yang telah tertuang dalam Qs. Al-Hasyr ayat 7.

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

“..., supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung hipotesis awal penelitian yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, atau teori *trickle down effect* dimana kemajuan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan terciptanya distribusi hasil ekonom yang merata. Sehingga hal tersebut secara otomatis akan memberikan manfaat ke seluruh lapisan masyarakat. Implikasinya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung memberikan keuntungan terlebih dahulu kepada

golongan kaya, sebelum akhirnya mengalir ke golongan miskin secara bertahap.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kevin, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh PDRB, Angka Harapan Hidup, dan Rata Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021”. Hasil dari penelitian tersebut adalah PDRB memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013-2021.

Peningkatan PDRB setiap tahunnya namun tanpa disertai dengan penciptaan lapangan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam peningkatan pendapatan. Hal ini mengakibatkan beberapa penduduk memiliki pendapatan di atas rata-rata, sementara yang lain masih di bawah rata-rata. Tanpa upaya pemerataan, tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan semakin menurun. Oleh sebab itu, adanya kenaikan PDRB suatu daerah tidak menjamin kesejahteraan yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah.

### **3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan**

Hasil uji  $f$  menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel IPM dan PDRB memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kendati telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan di wilayah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Pekalongan, namun tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten tidak mengalami penurunan yang signifikan. Walaupun secara statistik terdapat penurunan selama beberapa tahun terakhir, namun secara kualitatif dampaknya belum begitu terasa. Kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan juga mencakup aspek pendidikan, sosial, kesehatan dan politik. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan diantara standar hidup kelompok ekonomi bawah dan atas.

Dalam perspektif Islam, kemiskinan dapat timbul akibat perlakuan yang tidak adil dan kedzaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Kemiskinan muncul dapat terjadi disebabkan oleh sistem yang berlaku dalam masyarakat, yang menyebabkan individu atau kelompok tertentu tidak berdaya untuk keluar dari jerat kemiskinan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau  $X_1$  memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2023. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa  $t_{hitung} -6,476 > t_{tabel} 2,03693$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti peningkatan IPM akan mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau  $X_2$  tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019 – 2023. Hasil uji t terlihat bahwa  $t_{hitung} -0,094 < t_{tabel} 2,03693$  dan nilai signifikansi  $0,925 > 0,05$ . Dengan demikian berarti PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
3. Secara simultan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan Eks Karesidenan Pekalongan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah disajikan, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah serta pihak yang berkaitan agar lebih memperhatikan berbagai aspek dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan, penting bagi pemerintah daerah untuk fokus pada program-program pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat mencakup upaya peningkatan keterampilan

dan perluasan lapangan pekerjaan, memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki sehingga masyarakat dapat turut andil dalam mengelola dan merasakan manfaatnya, membangun dan meningkatkan infrastruktur yang layak, meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga pendidikan, serta mengupayakan pemerataan distribusi pendapatan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu saja.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar turut andil dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan mendukung program-program pengentasan kemiskinan yang digagas pemerintah.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel-variabel lain seperti tingkat pengangguran, upah minimum, dan jumlah penduduk yang dapat memperkaya analisis sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015
- Al Arif, Nur Rianto. *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Alhudori, M. "Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap penduduk Miskin di Provinsi Jambi". *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business* Vol. 1 No.1, 2017.
- Andhykha, Ridho et.al. "Analisis pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran ,dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol.33 No.2, 2018.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8 No.2, 2018.
- Aprilliyana, Nia. "Estimasi Indikator Kemiskinan Tingkat Kecamatan Menggunakan Regresi Kekar M-Kuantil", *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Badan Pusat Statistik. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2009.
- Badan Pusat Statistik. *Laporan Akhir Analisis Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2016*, Yogyakarta: BPS Yogyakarta, 2017.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Baeti, Nur. "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2 No.3, 2013.
- Beiq, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bintang, Aria Bhaswara Mohammad dan Nenik Woyanti. "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah", *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 33 No. 1, 2018.

- R. Bambang Budhijana. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2000-2017”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, Vol 5 No. 1, 2019.
- Damanik, Rapika Kesatriani dan Selna Aprilia Sidauruk. “Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Darma Agung*, Vol.28 No.3, 2020.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Fadilah, Nurul, Sukirman dkk. “Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM, dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013”, *Eko-Regional*, Vol.11 No.1, 2016
- Ghazali, Imam. *Aplikasi Multivariat dengan Program IBM SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Gunawan, Ce. *Mahir Menguasai SPSS*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hardjanto, Imam. *Teori Pembangunan*, Malang: UB Press, 2013.
- Hengky, Latan dan Selva Temalagi, *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Huda, Nurul, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Istan, Muhammad. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam”, *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Junus, Dikson, et.al., “Analisis Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato”, *Economics and Digital Business Review*, Vol. 3 No.2, 2022.
- Khomsan, Ali, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.
- Kuncoro, Mudrajad *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Kurnia, Wawan. “Pengaruh Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Dengan Kewilayahan Sebagai Variabel Moderasi)”, *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 1.1, 2017.

- Kusumo, Irawan Jati dan Etna Nur Afri Yuyetta. “Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit”, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 8 No.1, 2018.
- Laksamana, Rio. “Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Kalimantan”, *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tanjungpura*, Vol.5 No.2, 2016.
- Lestari, Indah dan Ega Suhada. “Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak”, *The Asia Pasific Journal of Management* Vol.7 No.2, 2020.
- Logaritma, Sandra, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Mahri, A. Jajang W. et.al., *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021
- Manopo, Juergen J.E., et.al., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Manado”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18 No.2, 2018.
- Muttaqin, Rizal. “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam”. *Maro: jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.1 No.2, 2018.
- Nafiah, Zumrotun dan Warno. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)”, *Jurnal STIE Semarang*, Vol.10 No.1, 2018.
- Nihayah, Ana Zahrotun. *Pengolahan Data Penelitian Menggunakan Software 23.0*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Ningrum, Jahtu Widya, et al., “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6, No.2, 2020.
- Nugroho, Adi dan Clarissa Alvina. *Indeks Pembangunan Manusia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Nurudin. “Pengaruh Sharia Marketing terhadap Loyalitas Anggota KSPPS BMT Walisongo Semarang”, *Jurnal Muqtasid*, Vol.8 No.1, 2017.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin dan U. Sulia Sukmawati. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia”, *Equilibrium*, Vol. 6 No.2, 2018.

- Priseptian, Laga dan Wiwin Priana Primandhana. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan”, *Forum Ekonomi*, Vol. 24, No.1, 2022.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008.
- Pudjianto, Bambang dan M. Syawie. “Kemiskinan dan Pembangunan Manusia”, *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol.1 No.3, 2015.
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*, Ponorogo: Wade Group, 2016.
- Rahman, Yozi Aulia dan Ayunda Lintang Chamelia. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012”, *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, Vol.8, No.1, 2015.
- Ridho, Andykha, et al., “Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”, *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol.33 No.2, 2018.
- Rodin, Dede. “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-qur’an”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.5 No.1, 2015.
- Sany, Ulfi Putra. “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39, No. 1, 2019
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Septianingrum, Resiska dan Deden Dinar Iskanda. “Determination Of Poverty At The District/City Level In Yogyakarta Province 2007-2018”, *Journal of Economics Development and Sosial Research*, Vol.1 No.1, 2021
- Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari. “Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten”, *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol.6 No.2, 2016.
- Subianto. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas”, *Motivasi*, Vol.3 No.2, 2018.
- Sudaryana, Bambang dan Ricky Agusady. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

- Tobing, Roy Kristanto Lumban. et.al, “Analisis Pengaruh Human Capital, Angkatan Kerja, dan Pendidikan Terhadap Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2006-2022”, *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, Vol 3 No.2, 2023.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid Satu*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Tsauri, Sofyan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Wahab. “Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Semarang”, *Economica*, Vol.5 No.2, 2014.
- Widyastuti, Sri. *Implementasi Etika Islam dalam Dunia Bisnis*, Jakarta: IRDH Book Publisher, 2019.
- Yuliana, Sa’adah et.al. “The Linkage of Human and Money Flows to Rural-Urban Fringe Poverty in South Sumatra, Indonesia: In an Islamic Perspective”, *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol.7 No.4, 2017.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### Data Penelitian

##### 1. Kemiskinan

#### Perkembangan Tingkat Kemiskinan Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Miskin (persen) Kemiskinan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	8.35	9.13	9.68	8.98	8.92
Kabupaten Pekalongan	9.71	10.19	10.57	9.67	9.67
Kabupaten Pemalang	15.41	16.02	16.56	15.06	15.03
Kabupaten Tegal	7.64	8.14	8.60	7.90	7.30
Kabupaten Brebes	16.22	17.03	17.43	16.05	15.78
Kota Pekalongan	6.60	7.17	7.59	7.00	6.81
Kota Tegal	7.47	7.80	8.12	7.91	7.68

##### 2. Indeks Pembangunan Manusia

#### Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	68.42	68.65	68.92	69.45	70.20
Kabupaten Pekalongan	69.71	69.63	70.11	70.81	71.40
Kabupaten Pemalang	66.32	66.32	66.56	67.19	68.03
Kabupaten Tegal	68.24	68.39	68.79	69.53	70.23
Kabupaten Brebes	66.12	66.11	66.32	67.03	67.95
Kota Pekalongan	74.77	74.98	75.40	75.90	76.71
Kota Tegal	74.93	75.07	75.52	76.15	77.02

### 3. Produk Domestik Regional Bruto

#### Perkembangan Laju Produk Domestik Regional Bruto Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	5.39	-1.29	4.88	5.97	5.53
Kabupaten Pekalongan	5.35	-1.89	3.54	5.11	5.14
Kabupaten Pemalang	5.80	-0.61	4.28	5.08	4.14
Kabupaten Tegal	5.56	-1.48	3.71	5.13	4.93
Kabupaten Brebes	5.76	-0.47	2.57	5.61	3.74
Kota Pekalongan	5.50	-1.87	3.59	5.76	5.44
Kota Tegal	5.77	-2.29	3.12	5.16	5.01

## LAMPIRAN 2

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.41716303
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.085
	Negative	-.100
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	64.947	8.387		7.744	.000		
	IPM	-.771	.119	-.753	-6.476	.000	.996	1.004
	PDRB	-.015	.159	-.011	-.094	.925	.996	1.004

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

### 3. Uji Heteroskedastisitas

**Correlations**

			IPM	PDRB	Unstandardized Residual
Spearman's rho	IPM	Correlation Coefficient	1.000	.046	-.248
		Sig. (2-tailed)	.	.794	.150
		N	35	35	35
	PDRB	Correlation Coefficient	.046	1.000	-.088
		Sig. (2-tailed)	.794	.	.615
		N	35	35	35
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.248	-.088	1.000
		Sig. (2-tailed)	.150	.615	.
		N	35	35	35

### 4. Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.801 <sup>a</sup>	.642	.619	1.61615	1.703

a. Predictors: (Constant), LAG\_X2, LAG\_X1

b. Dependent Variable: LAG\_Y

### LAMPIRAN 3

#### Uji Regresi Linear Berganda

##### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.754 <sup>a</sup>	.569	.542	2.49155

a. Predictors: (Constant), PDRB, IPM

##### 2. Uji Simultan (F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	261.819	2	130.909	21.088	.000 <sup>b</sup>
	Residual	198.651	32	6.208		
	Total	460.470	34			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), PDRB, IPM

##### 3. Uji Parsial (t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64.947	8.387		7.744	.000
	IPM	-.771	.119	-.753	-6.476	.000
	PDRB	-.015	.159	-.011	-.094	.925

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tingkat Kemiskinan	10.5483	3.68011	35
IPM	70.4823	3.59551	35
PDRB	3.6191	2.69644	35

### Correlations

		Tingkat Kemiskinan	IPM	PDRB
Pearson Correlation	Tingkat Kemiskinan	1.000	-.754	-.056
	IPM	-.754	1.000	.059
	PDRB	-.056	.059	1.000
Sig. (1-tailed)	Tingkat Kemiskinan	.	.000	.375
	IPM	.000	.	.367
	PDRB	.375	.367	.
N	Tingkat Kemiskinan	35	35	35
	IPM	35	35	35
	PDRB	35	35	35

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB, IPM <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

b. All requested variables entered.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Maulida Hikmiyati

Tempat, Tanggal Lahir : Pematang, 08 Juli 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds. Warungpring RT 06 RW 01 Kec. Warungpring Kab.  
Pematang

Email : Maulidahikmiyati48@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 01 Warungpring
2. SMP N 02 Moga
3. SMA N 01 Randudongkal